

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menuntun keberhasilan pendidikan. Di kelas guru merupakan subyek utama dalam kegiatan pembelajaran. Guru adalah salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil pendidikan. Korelasi antara guru dengan subjek didik, adalah relasi kewibawaan. Relasi kewibawaan bukan menimbulkan rasa takut pada subjek didik. Bukan pula pada relasi kekuasaan dimana subjek didik harus selalu tunduk, akan tetapi relasi yang menumbuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Guru adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas unik dalam pendidikan, peranan guru tidak dapat dilepaskan karena guru berperan sebagai agen pembaruan, mengarahkan subjek didik dan juga masyarakat mencapai sesuatu yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan ini guru berperan untuk menunjang lestarnya nilai-nilai yang perlu dipertahankan dan mencari nilai-nilai baru yang perlu digali.

Perbaikan kurikulum perlu didukung oleh profesionalisme guru. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Profesionalisme guru merupakan ujung tombak dalam implementasi

kurikulum di kelas perlu mendapat perhatian serius. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan melakukan berbagai upaya kemampuan dan keikhlasan khusus yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu. Adapun secara umum ciri-ciri dari suatu profesi adalah sebagai berikut:

- a. memiliki sesuatu keahlian khusus
- b. merupakan suatu panggilan hidup
- c. memiliki teori-teori yang baku secara universal
- d. mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri
- e. dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif
- f. memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan
- g. memiliki kode etik
- h. memiliki klien yang khusus
- i. mempunyai organisasi profesional yang kuat
- j. mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang lain.

Setelah dilakukan penelitian di SMA di Bandar Lampung adanya data baru yang ditunjukkan kuantitatif kondisi guru di Indonesia sebagai berikut:

Bahwa rata-rata secara nasional guru (termasuk kepala sekolah) SD Negeri menurut kelayakan mengajar tahun 1999/2000 adalah sebesar 42,4% layak mengajar, dan SD Swasta rata-rata 39,5% layak mengajar. Kemudian ditingkat SLTP, secara nasional kelayakan mengajar guru SLTP Negeri untuk seluruh mata pelajaran dari sebanyak 283.715 guru, terdapat 139.596 guru atau (49,2%) yang sesuai layak mengajar, sedangkan 30.325 (10,7%)

guru yang tidak sesuai dan layak mengajar, serta 25.571 (9,0%) yang sama sekali tidak mempunyai kesesuaian dan kelayakan untuk mengajar. Pada tingkat SLTA, ijazah tertinggi yang dimiliki guru SLTA Negeri dan swasta secara nasional menunjukkan bahwa dari 346.783 orang guru terdapat 13.819 guru berijazah PGLP/A/d2, 74.941 guru berijazah D3 / sarjana 211.791 guru 1.087 guru berijazah pasca sarjana (Pusat Statistik Pendidikan Baltbang diknas, 2000: 95).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi guru di Indonesia masih dalam taraf yang harus ditingkatkan profesionalismenya sebagai akibat kurang kualitas, kurang layak, kurang sesuai, dan masih banyak guru bidang studi tertentu yang merangkap atau mengajar bidang studi lain (Tilaar, 1999: 95).

Dalam era desentralisasi seperti tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari daerah otonom dalam kerangka NKRI pemerintah pusat hanya menangani kewenangan yang bersifat pengarah, perumusan kebijakan, pengawasan. Daerah dituntut melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, karena daerah tersebut yang mengetahui kondisi daerahnya, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat menyusun rencana, perumusan kebijakan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaannya.

Sejalan dengan desentralisasi ini dalam faktor pendidikan khususnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, maka daerah dalam hal ini dinas

pendidikan kabupaten diuntut untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan profesionalisme guru sesuai dengan kebutuhan dan kondisi guru di wilayah tersebut. Berdasarkan pada pemikiran dan kondisi di atas, maka masing-masing daerah perlu melakukan berbagai upaya pengembangan profesionalisme guru sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan latar belakang daerahnya, sehingga tujuan peningkatan profesionalisme guru dapat menyentuh seluruh lapisan guru sehingga pada akhirnya semua guru akan menikmati upaya peningkatan Profesionalismenya. Di samping itu para guru secara mandiri perlu berupaya meningkatkan profesionalismenya secara terus menerus tanpa harus menunggu dukungan dari luar.

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah telah menjadi kebijakan pemerintah yang harus di wujudkan sebaik-baiknya.

Di daerah Lampung khususnya di kota Bandar Lampung, para guru sekolah Menengah secara rutin diberi pembinaan, baik melalui penataran-penataran atau pelatihan-pelatihan terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran dan kurikulum berbasis kompetensi.

Pembelajaran berbasis kompetensi adalah program dimana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai siswa, sistem pencapaian dan indikator mencapai hasil belajar, dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai “Mc. Asahan (1998)”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa komponen pokok pembelajaran berbasis kompetensi melalui 3 hal yaitu:

- a) Kompetensi yang akan dicapai;
- b) Strategi yang akan dicapai untuk mencapai kompetensi;
- c) Sistem evaluasi atau pengujian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi.

Kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa perlu dirumuskan dengan jelas dan spesifik menurutnya “perumusan tersebut hendaknya didasarkan atas prinsip relevansi dan konsistensi antara kompetensi dengan materi yang dipelajari, waktu yang tersedia dan kegiatan serta lingkungan belajar yang digunakan”. Kebijakan tersebut memberi isyarat bahwa evaluasi merupakan komponen penting dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah memerlukan perhatian khusus untuk dibenahi.

Guru sebagai evaluator harus memahami konsep dasar evaluasi agar secara operasional dapat merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dengan baik. Dengan pengetahuan dan keterampilan dalam evaluasi akan sangat membantu ketercapaian efektivitas proses belajar mengajar, sebab dalam Proses Belajar Mengajar (KBM) evaluasi merupakan salah satu unsur yang penting. Dengan melakukan evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan PBM, dan dapat diperoleh bahan masukan untuk mengambil keputusan. Selain itu evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemajuan yang telah dicapai siswa, bagaimana dan sampai dimana penguasaan dan kemampuan yang siswa dapatkan setelah mempelajari suatu mata pelajaran. Di sinilah ketepatan penyusunan penguasaan strategi evaluasi diperlukan. Guru yang tidak tepat

penyusunan strategi evaluasi akan dapat hasil evaluasi yang biasa, dan pada giliran informasi yang tidak diterimapun tidak akurat. Selanjutnya bahwa guru dalam melakuakn evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam memberikan penilaian tentang kegiatan yang di lakukan.

Menurut S. Hand Hasan, dkk (1993) jenis keputusan yang di ambil guru tidak dapat dilepaskan dari fungsi evaluasi. Berdasarkan fungsi tersebut guru dapat menentukan tujuan evaluasi yang dilakukan.

Fungsi evaluasi tersebut adalah : formatif, sumatif, penempatan/ pengelompokan, diagnostic. Penelitian ini lebih memfokuskan fungsi evaluasi formatif yang dilakukan guru. Hal ini dengan pertimbangan alat evaluasi formatif yang umumnya di gunakan guru adalah merupakan alat yang belum di bakukan, sehingga perlu kiranya diteliti apakah alat evaluasi mampu dibuat dan dilaksanakan oleh guru, dan apakah alat evaluasi buatan guru memiliki standar baku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. peranan dinas pendidikan dalam pembinaan profesionalisme guru
2. peranan MGP dalam pembinaan profesionalisme guru
3. peranan PGRI dalam pembinaan profesionalisme guru
4. peranan MGMP dalam pembinaan profesionalisme guru

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas penulis membatasi masalah pada “ Peranan MGMP dalam menunjang profesionalisme guru PKn pada SMA Negeri di Bandar Lampung”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“bagaimanakah peranan MGMP terhadap Peranan pembinaan profesionalisme guru PKn pada SMA Negeri 1 di Bandar Lampung.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjelaskan pengaruh sistem pembinaan professional Guru melalui pola MGMP terhadap aktivitas pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Bandar Lampung Tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai masukan bagi kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan wawasan untuk guru.
- 2) Sebagai organisasi profesi guru ala meningkatkan mutu pendidikan guru

- 3) Sebagai masukan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup objek penelitian ini adalah peranan MGMP dalam pembinaan profesionalisme guru PKn pada SMA Negeri Bandar Lampung.

2. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah seluruh guru PKn SMA Negeri yang ikut tergabung dalam MGMP di Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

ruang lingkup wilayah penelitian ini yaitu SMA Negeri sebandar lampung

4. Ruang Lingkup Penelitian

penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan profesionalisme guru.